

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA SUNGAI KETAPI KECAMATAN PARINGIN

Selvia¹, Munawarah², Nida Urahmah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Email : Selviapn225@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat merupakan indikator penilaian keberhasilan rencana pemerintah daerah dan apakah pemberdayaan masyarakat tersebut sudah benar dan ditaati. Fenomena permasalahan pada Pemerintahan Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yaitu: Pengelolaan alokasi dana desa yang dirasa masih kurang efektif, efisien dan akuntabel, pemerintah desa dalam perencanaan APBDes lebih berfokus ke pembangunan infrastruktur fisik desa dari pada pemberdayaan masyarakat desa. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, Data meliputi Data Primer dan Data Sekunder. Sumber data penelitian ini adalah purposive sampel sebanyak 12 partisipan. Proses pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan pencatatan. Teknik analisis data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis berkelanjutan, eskalasi, triangulasi, analisis kerentanan, data referensi, dan penilaian keandalan data menggunakan membebrcheck. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan sudah berjalan cukup baik yang dijelaskan melalui teori Pengelolaan menurut G.R. Terry (dalam Hasibuan, 2011). Berdasarkan dari indikator *Planning* (Perencanaan) sudah berjalan cukup baik, *Organizing* (Pengorganisasian) sudah berjalan cukup baik, *Actuating* (Pergerakan) cukup baik, *Controlling* (Pengawasan) cukup baik. Sedangkan untuk Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dapat dilihat dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk faktor pendukung terdapat 2 faktor pendukung yaitu partisipasi masyarakat dan sumber daya desa sungai ketapi sedangkan untuk faktor penghambatnya ada ketidak sesuaian waktu yang telah ditentukan dan keterlibatan masyarakat dalam pemeriksaan.

Kata Kunci : Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

The management of village fund allocation in community empowerment is an indicator of assessing the success of local government plans and whether the community empowerment is correct and adhered to. The phenomenon of problems in the Sungai Ketapi Village Government, Paringin District, Balangan Regency is: The management of village fund allocation is still considered ineffective, efficient and accountable, the village government in planning the APBDes focuses more on the development of village physical infrastructure than on empowering the village community. The research approach used is qualitative, the data includes Primary Data and Secondary Data . The source of data for this study is a purposive sample of 12 participants. The data collection process consists of observation, interviews and recording. Data analysis techniques, data reduction, data presentation and conclusion drawn. Continuous analysis, escalation, triangulation, vulnerability analysis, reference data, and data reliability assessment using membebrcheck. The results of this study conclude that the Management of Village Fund Allocation (ADD) in Community Empowerment in Sungai Ketapi Paringin District, Balangan Regency has been running quite well which is explained through the theory of Management according to G.R. Terry (in Hasibuan, 2011). Based on the identities Planning has been running quite well, Organizing has been running quite well, Actuating has been quite good, Controlling has been quite good. As for what factors affect the allocation of village funds in the empowerment of the Sungai Ketapi Village Community, Paringin District, Balangan Regency, it can be seen from the supporting factors and inhibiting factors. For supporting factors, there are 2 supporting factors , namely community participation and river village resources , while for the inhibiting factors , there is a time discrepancy that has been and community involvement in the examination.

Keywords : Management, Village Fund Allocation , Community Empowerment

PENDAHULUAN

Seperti yang tertuang dalam UU Pemerintahan No. Pasal 6 UU Pemerintahan Desa Nomor 43 Tahun 2014 mewajibkan ADD Pemerintahan Desa untuk membantu masyarakat secara langsung. Untuk mencapai hal ini, perencanaan desa harus bersifat partisipatif, akuntabel, dan transparan. Pemberdayaan, sebagai proses pembangunan, kebebasan dan kemandirian, memperkuat dialog masyarakat kelas bawah melawan penindasan di semua bidang kehidupan dan pekerjaan. Cara paling efektif dan tercepat untuk mendukung masyarakat pedesaan mencapai tujuan mereka adalah dengan melibatkan masyarakat dan aktivis serta memastikan bahwa masyarakat terpencil mengetahui potensi daerah mereka, dengan mempertimbangkan kebutuhan kota mereka ketika mengalokasikan dana.

Masyarakat adalah Suatu keadaan yang mengandung unsur atau unsur ketertiban, keamanan, keadilan, perdamaian, kemakmuran dan arah kehidupan serta mengandung banyak unsur yang tidak hanya menjamin ketertiban dan stabilitas tetapi juga keadilan di semua tingkatan. Kesehatan mencakup semua tindakan dan proses etis, termasuk tindakan dan pencegahan masalah sosial, pengembangan sumber daya, dan peningkatan kualitas hidup. Berdasarkan hasil pra survey/observasi awal yang dilakukan oleh peneliti desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Berdasarkan dari data APBDes jumlah dana ADD yang ada di desa Sungai Ketapi yaitu sebesar Rp. 545.929.000,00 yang dipergunakan khusus dalam bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Meliputi penguatan ketahanan pangan lokal, peningkatan kapasitas pemimpin daerah, peningkatan kapasitas tenaga kerja daerah, peningkatan kapasitas BPD, perancangan/pelatihan/layanan produk dan perdagangan, pembinaan PKK, pelatihan pemberdayaan masyarakat. Mengembangkan kelompok masyarakat dan kesenian masyarakat, menyelenggarakan pertunjukan seni, membangun/merenovasi infrastruktur budaya/keagamaan di tingkat desa, mengelola pusat kepemudaan dan kesenian serta bangunan lokal.

Pembangunan masyarakat Sungai Ketapi bertujuan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa dengan bimbingan dan bantuan pemerintah. Pada penelitian awal ini peneliti menemukan bahwa pada pemberdayaan masyarakat di desa Sungai Ketapi pihak pemerintah desa memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan melakukan ternak sapi. Dalam pengelolaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat, informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan ADD di Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin, terutama kurangnya partisipasi masyarakat dalam proyek ADD pada saat peninjauan rencana pembangunan pada saat proses pelaksanaan. , yang ada hanyalah ketua RT, pimpinan sekolah, tokoh masyarakat, peserta kesehatan dan peserta lainnya, namun tidak ada masyarakat yang hadir.

Terungkap juga bahwa tokoh masyarakat saat ini hanya mendengarkan dan rencana pelaksanaannya dibuat oleh pemerintah daerah tanpa partisipasi masyarakat. Selain itu

Pemerintah desa dalam perencanaan APBDes lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik desa dari pada pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan dari SPJ yang disampaikan oleh pemerintah desa Sungai Ketapi bahwa Alokasi Dana Desa yang telah terealisasi adalah 55% pembangunan dan 10% pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola dengan baik dan jujur maka hasilnya akan terlihat lebih jelas dan juga sebaliknya. Fenomena permasalahan pada Pemerintahan Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yaitu: Pengelolaan alokasi dana desa yang dirasa masih kurang efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah desa dalam perencanaan APBDes lebih berfokus ke pembangunan infrastruktur fisik desa dari pada pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun Hasil Penelitian Terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah *Pertama*, Firdaus (2023) meneliti “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nagari Matua Hilia Kabupaten Agam”. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Matua Hilia melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, tetapi perencanaan penggunaan ADD lebih banyak difokuskan pada kegiatan pemerintah dan belum efektif untuk pemberdayaan masyarakat. Beberapa penghambat termasuk kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan kemampuan Kaur Keuangan dalam teknologi, dan manajemen keuangan yang tidak optimal (Firdaus, B., & Maani, 2023). *Kedua*, Rahayu (2019) meneliti “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser”. Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan Dana Desa telah dilakukan, meskipun perencanaan belum maksimal karena rendahnya sumber daya manusia. Dana Desa dilaksanakan secara efektif dan efisien, namun terhambat oleh kondisi alam dan regulasi. Partisipasi masyarakat dan semangat gotong royong menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan Dana Desa. (Rahayu, 2019)

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti memimpin, mengendalikan, dan mengatur agar berjalan lebih baik dan bertanggung jawab. Pengelolaan adalah proses untuk merumuskan kebijakan dan tujuan serta memberikan pengawasan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan. Pengelolaan adalah pelaksanaan untuk mengatur suatu hal atau proses dalam manajemen. Tanpa pengelolaan, anggaran yang ada tidak memiliki arah dan tujuan. Pengelolaan juga penting dalam keuangan, termasuk keuangan desa, untuk mencapai pembangunan yang terarah. Ketepatan dalam pengelolaan diperlukan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara lengkap. Suatu pencapaian tujuan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat juga merupakan pengelolaan. Manajemen adalah proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Menurut G. R. Terry dalam (Yusuf, M., Haryoto, C., Husainah, N., 2023), pengelolaan mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang disingkat menjadi akronim POAC. Fungsi pertama adalah perencanaan (planning), yang berarti menentukan tujuan di masa depan dan langkah-langkah untuk mencapainya. Perencanaan dilakukan untuk mengarahkan tujuan organisasi dan

menciptakan “peta kerja” untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi kedua adalah pengorganisasian (*organizing*), yang merupakan proses menyusun organisasi sesuai dengan tujuan dan sumber daya. Pengorganisasian membagi kegiatan besar menjadi kegiatan lebih kecil agar mempermudah pengawasan dan penugasan individu melalui struktur organisasi. Ini mengumpulkan sumber daya manusia, modal, dan peralatan secara efektif untuk mencapai tujuan. Fungsi ketiga adalah pelaksanaan (*actuating*), yang berarti menggerakkan semua anggota untuk mencapai sasaran sesuai rencana. Pelaksanaan adalah proses mendorong individu atau kelompok untuk melakukan kegiatan demi efisiensi dan efektivitas. Pengarahan diperlukan untuk membagi tugas sesuai bidang masing-masing, melalui konsultasi dan bimbingan. Fungsi terakhir adalah pengawasan (*controlling*), yang menilai kinerja berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan mengamati pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai rencana dan memastikan semua aktivitas yang direncanakan dapat dicapai. Pengawasan juga memberikan umpan balik untuk melakukan penyesuaian bila ada penyimpangan. Keseluruhan proses pengelolaan saling terkait, dan kelalaian dalam satu proses dapat memengaruhi keseluruhan kegiatan pengelolaan.

Pengelolaan yang baik merupakan dasar bagi pengembangan organisasi, termasuk pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan lainnya. Pengelolaan yang baik menunjukkan bahwa organisasi memenuhi syarat untuk membangun kredibilitas, integritas, dan otoritas dalam membuat keputusan serta mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan anggota. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan, reputasi, dan pengaruh terhadap anggota melalui interaksi yang positif. Kegagalan dalam pengelolaan yang baik dapat merusak reputasi dan efektivitas organisasi, serta berdampak buruk pada pihak yang diwakili.

Menurut G. R. Terry, pengelolaan yang baik mencakup: Perencanaan, yang meliputi pemilihan dan penghubungan fakta serta perumusan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pengorganisasian, yang mengatur kegiatan dan menetapkan wewenang serta tanggung jawab. Penggerakan, yang memastikan anggota bekerja menuju tujuan yang ditetapkan. Pengawasan, yang melibatkan penentuan pencapaian, pengukuran, dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan. (Hasibuan, 2011)

UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa setiap tahun dalam APBD, yang menjadi salah satu sumber pendapatan desa. Dana Desa bertujuan mendukung pemerintahan dan pembangunan desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan Dana Desa mencakup peningkatan pelayanan publik, kemajuan ekonomi desa, pengentasan kemiskinan, serta penguatan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Sejak 2015, Dana Desa yang bersumber dari APBN dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Alokasi Dana Desa juga dikenal sebagai ADD, yang direncanakan melalui pemerintah daerah. Pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa, bagian dari hasil PDRD, alokasi dari kabupaten/kota, bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten/kota, hibah, sumbangan pihak ketiga, serta pendapatan sah lainnya.

Pengelolaan dana desa berdasarkan PEMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 menjelaskan tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Tujuan pengelolaan adalah memanfaatkan sumber daya manusia dan peralatan agar tidak terjadi pemborosan, sehingga tujuan dapat tercapai. Pengelolaan diperlukan dalam setiap organisasi, karena tanpa pengelolaan yang baik, tujuan sulit dicapai. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian penting dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. Pengelolaan ADD harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu, yaitu: seluruh kegiatan harus direncanakan dan dievaluasi secara terbuka; kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan; pengelolaan harus hemat dan terarah; kegiatan yang dibiayai terbuka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; dan ADD harus dicatat dalam APBDesa sesuai mekanisme yang berlaku.

METODE

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kantor Desa Sungai Ketapi, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Kode Pos 71611. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali hasil penelitian melalui wawancara dan observasi langsung, sehingga menghasilkan deskripsi yang logis dan kritis mengenai keadaan yang diteliti. Metodologi penelitian diperlukan untuk mengulas, mengembangkan, dan menguji kebenaran guna menemukan pengetahuan secara ilmiah. Berbagai metode dapat diterapkan, dan pemilihan metode harus sesuai dengan prosedur dan desain penelitian. Tipe penelitian ini menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari pegawai dan pelaku yang diamati. Data dibagi menjadi dua jenis: Data Primer dan Data Sekunder. Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan 12 informan.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mencatat fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik ini membantu peneliti mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan penyaluran Rastra dengan mengamati kondisi masyarakat dan lingkungan. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan menggunakan pedoman wawancara. Dokumentasi mengumpulkan data dari sumber yang relevan berupa rekaman makalah, buku, surat, arsip, dan hasil penelitian lainnya. Analisis data kualitatif melibatkan aktivitas yang berlangsung terus-menerus hingga data dianggap jenuh, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data adalah proses pemilihan dan transformasi data mentah menjadi ringkasan yang lebih sederhana. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data ke dalam bentuk naratif. Penarikan kesimpulan mencakup proses awal dan verifikasi. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang kuat. Uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, melakukan triangulasi, menganalisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan melakukan *memberchek*. (Sugiyono, 2016)

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan sudah berjalan cukup baik yang dijelaskan melalui teori Pengelolaan menurut G.R. Terry (dalam Hasibuan, 2011). Berdasarkan dari indikator :

- 1) *Planning* (perencanaan) merupakan fungsi pertama dari fungsi pengelolaan. Secara umum, *Planning* (perencanaan) dapat diartikan suatu proses dalam menentukan sesuatu yang ingin dicapai, tujuan di masa yang akan datang serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dapat juga dimaknai perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki. *Planning* (Perencanaan) sudah berjalan cukup baik dari segi penyusunan APBDes sudah terlaksana dengan baik dengan mengadakan musyawarah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat sehingga mencapai kesepakatan bersama dan standar dan ketepatan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan juga sudah baik karena APBDes yang dianggarkan sudah ditinjau terlebih dahulu oleh pihak kecamatan apabila tidak sesuai maka akan dilakukan ulang penyusunan APBDes tersebut.
- 2) *Organizing* (pengorganisasian) merupakan fungsi kedua dari fungsi manajemen. Pengorganisasian (*organizing*) dapat diartikan sebagai proses kegiatan dalam menyusun organisasi sesuai dengan tujuan, sumber daya, dan lingkungannya. Pengorganisasian (*organizing*) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi melalui struktur organisasi. *Organizing* (Pengorganisasian) dalam hal ini pemerintah desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan sudah melaksanakan dengan baik baik itu dari segi sumber daya manusia yang dapat dilihat dari siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa dan apa saja peran mereka. Kemudian berdasarkan karakteristik organisasi pelaksanaan hal ini dapat dilihat dari bentuk dukungan yang diberikan dalam implementasi kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dalam pengelolaan alokasi dana desa sikap para pelaksana cukup baik hal ini dapat dilihat dari program yang dijalankan sudah sesuai dengan keadaan masyarakat desa itu sendiri. Selanjutnya komunikasi, pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat cukup baik hal ini dapat dilihat dari kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam menentukan program pemberdayaan masyarakat yang akan mereka jalankan,
- 3) *Actuating* (*pelaksanaan*) merupakan fungsi ketiga dari fungsi manajemen. *Actuating* (*pelaksanaan*) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Pelaksanaan adalah proses penggerakan orang-orang untuk melakukan kegiatan pencapaian tujuan sehingga terwujud efisiensi proses dan efektivitas hasil

kerja.

- 4) *Actuating* juga dapat diartikan pengarahan, pengarahan sangat diperlukan pembagian tugas terhadap setiap individu atau kelompok dalam perusahaan sesuai dengan bidang masing-masing. Pengarahan dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan, konsultasi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu atau kelompok. Jadi, *Actuating* (pelaksanaan) dalam manajemen memiliki peran yang sangat penting, karena dengan pelaksanaan maka organisasi atau perusahaan dapat merealisasikan sebuah rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. *Actuating* (Pergerakan) merupakan suatu Tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Diukur dari segi efisiensi dalam hal *actuating* (Pergerakan) di desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan cukup baik karena pada pengelolaan alokasi dana desa dalam program pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan keadaan desa dan masyarakat setempat Selanjutnya *actuating* (Pergerakan) dari segi Penggunaan ADD cukup baik dilihat dari kesesuaian antara uang yang dikeluarkan dengan APBDes. Dan ditinjau dari *actuating* (Pergerakan) dari segi kesesuaian program pada pengelolaan alokasi dana desa cukup baik hal ini dapat dilihat dari ketepatan sasaran dalam memberikan program pemberdayaan masyarakat yang dibuat dan ketepatan waktu yang telah ditentukan,
- 5) *Controlling* (pengawasan) dapat didefinisikan sebagai proses pemberian balikan (umpan balik) dan tindak lanjut pembandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tindakan penyesuaian apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya. Keseluruhan proses tersebut merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sehingga pada setiap tahapannya harus dilaksanakan dengan cermat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ketidaksempurnaan dalam menjalankan salah satu proses tersebut adakan berdampak terhadap keseluruhan kegiatan pengelolaan. *Controlling* (Pengawasan) ditinjau dari segi pemeriksaan pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat cukup baik karena pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas sudah berdasarkan ukuran atau standar pengawasan terhadap pemberdayaan masyarakat. Kemudian dari segi evaluasi, Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan sudah melakukan dengan cukup baik karena setiap kegiatan selesai diselenggarakan selalu diadakan rapat untuk mengukur apakah sebuah kegiatan atau program dilaksanakan sesuai perencanaan dan berhasil mencapai tujuan atau tidak.

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan

Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dapat dilihat dari :

- (1) Faktor pendukung yaitu Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan apbdes cukup baik

karena melibatkan semua pihak baik dari pemerintah desa, aparat desa maupun masyarakat desa dan Sumber Daya Desa Sungai Ketapi cukup baik karena semua pihak yang bersangkutan terlibat aktif dalam mewujudkan tujuan yang ingin mereka capai secara bersama, baik itu dari pihak pemerintah desa, masyarakat maupun aparat desa lainnya. Faktor pendukung pertama yang dapat mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sungai Ketapi adalah adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan apbdes. Dengan masyarakat ikut berpartisipasi secara langsung dalam pembahasan perencanaan apbdes maka dapat memudahkan pemerintah desa dalam merumuskan prioritas kebutuhan maupun program yang diinginkan oleh masyarakat Desa Sungai Ketapi. Pada pengelolaan alokasi dana desa pada desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan ini dapat diukur melalui siapa saja stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa dan apa saja perannya.

- (2) Untuk faktor penghambat yang ditemui yaitu ketidak sesuaian waktu yang telah ditetapkan dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pemeriksaan atau pengawasan. Dalam pengelolaan alokasi dana desa kesesuaian program mempengaruhi baik atau tidaknya program yang dijalankan apakah waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan apa yang terealisasi dilapangan. Keterlibatan masyarakat dalam pemeriksaan pada pengelolaan alokasi dana desa pada desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan ini tentunya menjadi ukuran atau standar pengawasan terhadap pemberdayaan masyarakat.

SIMPULAN

Dari yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses pelaksanaan terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan sudah berjalan cukup baik. *Pertama, Planning* (Perencanaan) sudah terlaksana cukup baik karena baik itu dari segi penyusunan APBDes sudah terlaksana dengan baik dengan mengadakan musyawarah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat sehingga mencapai kesepakatan bersama dan standar dan ketepatan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan juga sudah baik karena APBDes yang dianggarkan sudah ditinjau terlebih dahulu oleh pihak kecamatan apabila tidak sesuai maka akan dilakukan ulang penyusunan APBDes tersebut. *Kedua, Organizing* (Pengorganisasian) dalam hal ini pemerintah desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan sudah melaksanakan dengan baik baik itu dari segi sumber daya manusia yang dapat dilihat dari siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa dan apa saja peran mereka. Kemudian berdasarkan karakteristik organisasi pelaksanaan hal ini dapat dilihat dari bentuk dukungan yang diberikan dalam implementasi kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dalam pengelolaan alokasi dana desa sikap para pelaksana cukup baik hal ini dapat dilihat dari program yang dijalankan sudah sesuai dengan keadaan masyarakat desa itu sendiri. Selanjutnya komunikasi, pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat cukup baik hal ini

dapat dilihat dari kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam menentukan program pemberdayaan masyarakat yang akan mereka jalankan. *Ketiga, actuating* (Pergerakan) merupakan suatu Tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Diukur dari segi efisiensi dalam hal *actuating* (Pergerakan) di desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan cukup baik karena pada pengelolaan alokasi dana desa dalam program pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan keadaan desa dan masyarakat setempat. Selanjutnya *actuating* (Pergerakan) dari segi Penggunaan ADD cukup baik dilihat dari kesesuaian antara uang yang dikeluarkan dengan APBDes. Dan ditinjau dari *actuating* (Pergerakan) dari segi kesesuaian program pada pengelolaan alokasi dana desa cukup baik hal ini dapat dilihat dari ketepatan sasaran dalam memberikan program pemberdayaan masyarakat yang dibuat dan ketepatan waktu yang telah ditentukan. *Keempat, controlling* (Pengawasan) ditinjau dari segi pemeriksaan pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat cukup baik karena pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas sudah berdasarkan ukuran atau standar pengawasan terhadap pemberdayaan masyarakat. Kemudian dari segi evaluasi, Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan sudah melakukan dengan cukup baik karena setiap kegiatan selesai diselenggarakan selalu diadakan rapat untuk mengukur apakah sebuah kegiatan atau program dilaksanakan sesuai perencanaan dan berhasil berhasil mencapai tujuan atau tidak.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan antara lain :
 - 1) Faktor pendukung yaitu Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan APBDes cukup baik karena melibatkan semua pihak baik dari pemerintah desa, aparat desa maupun masyarakat desa dan Sumber Daya Desa Sungai Ketapi cukup baik karena semua pihak yang bersangkutan terlibat aktif dalam mewujudkan tujuan yang ingin mereka capai secara bersama, baik itu dari pihak pemerintah desa, masyarakat maupun aparat desa lainnya.
 - 2) Faktor penghambat yang ditemui yaitu ketidak sesuaian waktu yang telah ditetapkan dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pemeriksaan atau pengawasan.

Untuk Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, disarankan agar: Pemerintah Desa mempertahankan dan meningkatkan kinerja agar desa lebih maju. Kepala Desa dan perangkat desa harus kompeten, muda, berjiwa kepemimpinan, melek teknologi, dan memiliki pendidikan yang baik. Ini penting untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan baik dan menghadapi tantangan masa kini. Dalam program pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa harus memperhatikan ketepatan waktu pelaksanaan program. Dan Pemerintah desa perlu melibatkan masyarakat dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Sungai Ketapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Ainah, N. et al. (2022) 'ANALISIS PENGGUNAAN E-COMMERCE DI BIDANG FASHION TERHADAP LABA USAHA MIKRO DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.', *Journal of Syntax Literate*, 7(9).
- Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'EPEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.
- Anjasmari, N.M.M. (2022) 'KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 AMUNTAI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Administraus*, 6(2), pp. 152–159.
- Anjasmari, N.M.M. (2023) 'KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2163–2171.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Arlan, A.S. (2022) 'KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN', *Al'idara Balad*, 4(2), pp. 14–21.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.
- Arlan, A.S. (2025) 'Peran Pemerintah Desa Sawang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin', *Administraus*, 9(1), pp. 85–97.
- Arlan, A.S. and Aida, N. (2023) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administraus*, 7(2), pp. 38–53.
- Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEKAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.
- Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.
- Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) 'Efektivitas Program Penyediaan Air

- Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.
- Budiman, A. and Souvia, B. (2023) 'IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI'YAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.
- Emilyana, R. (2025) 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENURUNAN STUNTING PADA UPT PUSKESMAS JUAI (STUDI KASUS DESA BUNTU KARAU DAN HUKAI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN)', *Al Idara Balad*, 6(2), pp. 396–403.
- Fatimah, F. and Saladin, G. (2024) 'Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Subur Agro Makmur', *JURNAL BISNIS DAN PEMBANGUNAN*, 13(2), pp. 116–123.
- Firdaus, B., & Maani, K.D. (2023) 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nagari Matua Hilia Kabupaten Agam', *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, pp. 1–9.
- Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) 'Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.
- Handayani, R. and Rahmah, N.N. (2024) 'Pengaruh Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Penurunan Angka Stunting Di Desa Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administratus*, 8(3), pp. 124–132.
- Hasbiyah, S. (2022) 'IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU', *Administratus*, 6(2), pp. 160–168.
- Hasbiyah, S. (2024) 'IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.
- Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) 'Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.
- Hasibuan, M.S. (2011) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Husaini, M. (2022) 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), pp. 15827–15834.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Hutabarat, Z.S. *et al.* (2023) 'Teaching practice program in college of education–creativity, emotional intelligence and locus of control', *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 9(1), pp. 244–257.
- Jumaidi, J. (2025) 'PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS RAWAT INAP KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULUS SUNGAI TENGAH', *Al Idara Balad*, 6(2), pp. 361–369.
- Junaidi, J. (2025) 'INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR', *Al Idara Balad*, 6(2), pp. 370–377.
- Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) 'Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan

- Kabupaten Hulu Sungai Selatan’, *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.
- Munawarah, M. (2022) ‘PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.
- Mutmainah, F., Husaini, M. and Sugiannor, S. (2024) ‘Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar)’, *Jurnal pelayanan publik*, 1(1), pp. 11–19.
- Oktaviany, P.A. *et al.* (2023) ‘Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI “GUSI”)’’, *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.
- Orbawati, O. (2025) ‘KUALITAS PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 386–395.
- Rahayu, S. (2019) ‘Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser’, *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, pp. 1681–1692.
- Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) ‘PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN’, *Al’iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.
- Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) ‘Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.
- Raudah, S. and Radawiyah, R. (2023) ‘Pengaruh Pengelolaan Arsip Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pertahanan Kabupaten Balangan’, *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 12(1), pp. 64–72.
- Saputra, T. *et al.* (2023) ‘Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems’, *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I. (2023) ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara’, *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.
- Setiawan, I. (2024) ‘Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara’, *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) ‘The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia’, *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117. Available at: <https://doi.org/10.11648/j.jpaa.20210503.16>.
- Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) ‘PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG’, *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.
- Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) ‘IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.
- Sugiyono (2016) *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Trio, S. *et al.* (2023) ‘Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province’, *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.
- Yusuf, M., Haryoto, C., Husainah, N., & N. (2023) *Teori Manajemen*. Sumatra Barat: Cendikia Muslim.